



SIKAP PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP NOTA PROTES CHINA ATAS EKSPLORASI MINYAK DI WILAYAH NATUNA

Endro Legowo¹⁾, Eko G. Samudro²⁾, Siti Sarah³⁾

^{1,3)}Prodi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan RI

²⁾ Prodi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional,

Universitas Pertahanan RI

Abstrak

Wilayah Perairan Natuna Utara dikenal dengan alur laut terpadat kedua di dunia setelah Terusan Suez di Mesir, wilayah ini juga mengandung kekayaan biota laut yang melimpah serta ketersediaan cadangan gas alam dan minyak. Atas potensi tersebut, kawasan ini masih menjadi perebutan claim diantara beberapa negara. Indonesia tidak termasuk negara claimant di wilayah Laut Natuna Utara, namun berkepentingan di wilayah tersebut khususnya di wilayah Laut Natuna dan sekitarnya. Belum lama ini, China memberikan nota kepada Indonesia yang berisikan protes terkait pengeboran minyak di wilayah Natuna, padahal Natuna termasuk wilayah Indonesia. Hal ini terjadi karena ada perbedaan konsep kedaulatan laut yang berbeda antara Indonesia dan China. Indonesia mengacu pada UNCLOS, sedangkan China tidak ingin mengakui UNCLOS dan berpatokan pada konsep sembilan garis putus-putus sebagai wilayah perikanan tradisionalnya. Dalam tulisan ini akan membahas tentang bagaimana respon Indonesia dan bentuk kebijakan strategis apa yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi kasus tersebut.

Kata Kunci: Nota Protes, Eksplorasi Minyak, Kawasan Laut China Selatan.

PENDAHULUAN

Wilayah Laut Natuna Utara ialah jalur perairan yang memiliki potensi untuk sektor ekonomi khususnya sebagai jalur perdagangan atau pelayaran internasional. Selain menjadi

alur laut tersibuk kedua di dunia, perairan ini juga mempunyai keanekaragaman biota laut yang berlimpah serta memiliki sumber gas alam dan minyak yang melimpah. Dengan kondisi tersebut, kawasan Laut Natuna Utara masih menjadi perebutan

claim antar beberapa negara di Asia Tenggara yang mempunyai zona laut yang dekat dengan kawasan tersebut. Selain beberapa negara di Asia Tenggara, Amerika Serikat juga menjadi salah satu negara yang turut andil dalam bergolaknya ketegangan di wilayah Laut Natuna Utara.

China saat ini terus tumbuh menjelma sebagai kekuatan baru di wilayah Asia Pasifik. Lebih lanjut, bahwa China menampilkan karakteristik hegemoninya pada sengketa Laut Natuna Utara. Karakteristik hegemoni yang ditandai dengan meningkatkan kekuatannya guna menekan negara lain ditampilkan dengan terus meningkatkan anggaran militer, modernisasi alutsista militer, serta melakukan reklamasi membentuk pulau sebagai landasan pesawat dan pembangunan yang dicurigai instalasi militer di beberapa pulau yang dikuasai, baik di Kepulauan Paracel maupun Kepulauan Spratly (SIPRI, 2015).

Indonesia tidak menjadi negara pengklaim di wilayah Laut Natuna Utara, tetapi Indonesia juga mempunyai kepentingan di wilayah tersebut. Salah satunya yaitu kepentingan ekonomi khususnya pada Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Natuna dan sekitarnya. Indonesia menyatakan dirinya sebagai *non-claimant states* saat terjadi persengketaan di Laut Natuna Utara tersebut. Indonesia juga tidak meniru jejak beberapa negara lain yang mulai mengembangkan nuklir pada saat ketegangan sengketa ini terjadi, karena tidak sejalan dengan ideologi negara. Dengan memperkuat strategi pertahanan maritimnya, Indonesia juga berfokus pada strategi *balance of power* dengan negara-negara lain yang juga tidak mengharapkan terjadinya perang terbuka di kawasan Laut China Selatan/Natuna Utara tersebut.

Namun belum lama ini, China memberikan nota kepada Indonesia yang berisikan protes terkait pengeboran

minyak di wilayah Natuna, padahal Natuna

termasuk wilayah Indonesia. Hal ini terjadi karena ada perbedaan konsep kedaulatan laut yang berbeda antara Indonesia dan China. Indonesia menggunakan UNCLOS, sedangkan China tidak bersedia mengakui UNCLOS dan menggunakan konsep sembilan garis putus-putus sebagai *traditional fishing grounds*-nya. Besarnya ambisi Tiongkok atas kepemilikan wilayah-wilayah perairan ini, mengakibatkan beberapa kawasan strategis seperti, Sparty, Pacarel, bahkan Natuna menjadi bagian dari klaim *nine-dash line* Tiongkok. Belajar dari kasus klaim Tiongkok silam, pada tahun 1988 Tiongkok menjalankan ekspansi ke kepulauan Spratly. Ekspansi dilakukan dengan menghadirkan instalasi militer secara masif di kepulauan Spratly (Shabrina, 2017).

Di tahun 1988, terdapat konflik Tiongkok-Vietnam yang saat itu terjadi penguasaan di kepulauan Spratly dan Paracel dengan mengusir paksa Vietnam. Hal ini semakin diperkuat dengan upaya *de jure* dengan menerbitkan UU tentang Laut Teritorial dan *Contiguous Zone* yang memasukkan Kepulauan Spratly sebagai wilayahnya. Tiongkok melakukan hal serupa dengan membuat nota protes terhadap eksplorasi atau pengeboran minyak di kawasan Natuna oleh Indonesia. Aktivitas ini tentunya menjadi ancaman bagi kedaulatan Indonesia (Shabrina, 2017).

Wilayah laut di Natuna ialah bagian wilayah dari Kabupaten Natuna yang menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Natuna merupakan kepulauan paling utara di selat Karimata. Wilayah Perairan Natuna ini merupakan daerah yang berbatasan dengan negara-negara tetangga, dan juga terhubung dengan perairan bebas sehingga tidak heran jika wilayah Perairan Natuna ini

rawan diakui oleh pihak lain. Mengacu pada ZEE yang ditarik dari garis Pantai Kepulauan Natuna sepanjang 200 mil merupakan teritori laut wilayah Indonesia dan itu memang sudah menjadi Kedaulatan yang seharusnya dijaga dan tidak boleh semaunya untuk di salah gunakan.

UNCLOS tahun 1982 menegaskan jika negara lain dilarang untuk secara bebas mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber daya di Laut Natuna. Kebijakan itu tidak membuat Tiongkok mundur melainkan terus membuat pembelaan bahwa mereka benar-benar telah mengambil kekayaannya di wilayahnya sendiri. Tindakan-tindakan yang lainnya oleh Tiongkok apapun itu sudah sangat mengancam Kedaulatan NKRI melalui wilayah Kemaritiman. Pemerintah Indonesia harus sudah mempertimbangkan hal ini sejak awal, yaitu batas-batas kenegaraan yang sangat rawan untuk di akui wilayahnya (*Claim Territory*).

Negara Indonesia memang harus lebih kuat dalam menjaga wilayah teritorialnya dengan menggerakkan semua kekuatan sektor militer maupun dengan hanya penguatan pengawasan saja di Perairan Natuna serta di beberapa perbatasan lainnya (Shabrina, 2017).

Artikel ini bertujuan membahas isi dari nota protes China terkait eksplorasi minyak di kawasan Natuna, respon para ahli di Indonesia atas protes China tersebut, dan sikap atau tindakan strategis yang bisa diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi kasus tersebut secara tegas agar tidak akan terjadi kasus yang sama dan menimbulkan *deterrence effect* bagi negara-negara lain agar tidak mengganggu kedaulatan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan

menggunakan pendekatan penelitian studi kepustakaan. Kepustakaan yakni jenis penelitian yang dikerjakan dengan membaca beberapa referensi dan sumber data lainnya guna menghimpun temuan dari berbagai literatur, baik perpustakaan dan juga tempat-tempat lain (Mahmud, 2011).

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sumber data tidak selalu didapat dari observasi lapangan. Sumber data dapat saja diperoleh dari perpustakaan atau dokumen lain berbentuk tulisan seperti jurnal, buku, atau literatur yang lain. Studi literatur dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan respon pemerintah Indonesia atas nota protes china terkait pengeboran minyak di kawasan natuna.

Sumber data dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, halaman *website* dan referensi lain yang dianggap relevan dengan tema dalam penelitian ini. Penulis menggunakan teknik analisis data dengan strategi analisis deskriptif kualitatif. Teknik dalam penelitian ini memberikan gambaran terkait bagaimana sebuah fenomena dan bagaimana penyelesaian yang dilakukan dalam menghadapi fenomena tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nota Protes China Terkait Eksplorasi Minyak di Kawasan Natuna

Pemerintah Indonesia harus berpendapat dan berada pada posisi tegas atas nota keberatan China akibat eksplorasi / pengeboran minyak dan gas alam di kawasan laut di lepas Pantai Natuna Utara, yang menjadi bagian dari wilayah Laut Cina Selatan yang sedang diperebutkan banyak negara. Dilaporkan bahwa China melayangkan nota protes tersebut di awal bulan Desember 2021 dan secara jelas menghendaki Indonesia menghentikan pengeboran di *rig* lepas

pantai sementara yang menjadi bagian dari wilayah China.

Selain daripada hal tersebut, China juga melayangkan nota protes tentang latihan militer gabungan "Garuda Shield," yang sebagian besar berlangsung di darat. Namun demikian, selama beberapa tahun China melakukan klaim tidak berdasar yang sama pada negara-negara di ASEAN. Ini dikarenakan bahwa China menggunakan konsep sembilan garis putus-putus sebagai wilayah perikanan tradisionalnya.

Awal dari sengketa di Laut China Selatan, Indonesia telah menegaskan posisinya sebagai negara yang tidak memiliki klaim (*non claimant state*) terhadap Laut China Selatan. Akan tetapi, Indonesia mulai ikut terlibat ke dalam konflik di wilayah tersebut setelah China mengeluarkan peta *Nine Dashed Line* yang mencakup perairan Kepulauan Natuna di dalamnya. Indonesia menyadari peta *Nine Dashed Line* ini pada tahun 1993, saat diselenggarakannya *Workshop Managing Potential Conflicts in South China Sea*.

Kala itu, perwakilan dari China menunjukkan satu peta yang menggambarkan *Nine Dashed Line* yang mencakup wilayah perairan Natuna. Anggota dari Indonesia mengklarifikasi maksud dari garis-garis dalam peta tersebut namun Tiongkok tidak menyampaikan respon tegas perihal garis tersebut (Lumbanrau, 2016). Akibatnya kini pihak China mengirimkan nota keberatan terhadap eksplorasi gas alam dan minyak di kawasan laut di lepas pantai Natuna Utara yang sudah jelas masuk wilayah perairan Indonesia menurut UNCLOS.

Tanggapan para Ahli di Indonesia atas protes China terkait Pengeboran Minyak di Kawasan Natuna

Beberapa ahli menanggapi kasus protes China atas pengeboran yang dilakukan Indonesia di wilayahnya sendiri. Salah satunya Prof. Hikmahanto Juwana, menyatakan jika nota protes itu tidak perlu ditanggapi. "Justru Pemerintah Indonesia melalui Bakamla perlu melakukan pengamanan agar pengeboran di rig lepas pantai tetap terlaksana," tegasnya.

Terdapat beberapa alasan yang dapat menjadi pertimbangan Indonesia untuk mengabaikan nota protes China. Pertama, Indonesia tidak pernah mengakui sembilan garis putus yang digambarkan China di Laut China Selatan. Sedangkan China memberikan protes dengan dasar klaim sembilan garis putus tersebut. Hal kedua ialah karena selama ini China mengklaim sembilan garis putus yang menjorok ke Indonesia terkait sumber daya alam sebagai '*traditional fishing ground*'. Wilayah perikanan ini mengacu pada sumber daya laut yang berada di kolom laut, seperti ikan. Tapi protes China menyangkut aktifitas pengeboran sumber daya yang ada dibawah dasar laut.

Lebih lanjut, Hikmahanto menyatakan dengan tidak merespon protes China artinya Indonesia konsisten tidak setuju atas klaim China untuk sembilan garis putus. Selain itu, ujarnya, "merupakan hal yang tepat bagi Indonesia untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di dasar laut tanpa menghiraukan protes China" karena Indonesia justru mempertahankan hak berdaulat atas Landas Kontinen Indonesia di Natuna Utara sesuai ketentuan Konvensi Hukum Laut PBB (Marrieva, 2021).

Dr. Dinna Prapto Raharja, pendiri *Synergy Policies*, turut menegaskan bahwa Indonesia harus menanggapi nota protes China itu. "Nota protes China itu tidak berdasar dan menunjukkan bahwa memang tidak ada penghormatan atas kedaulatan wilayah

negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Nota ini wajib ditanggapi dengan bahasa yang terang dan tidak ditutup-tutupi tentang kekecewaan Indonesia atas komitmen China menghormati kedaulatan negara-negara Asia Tenggara," ujarnya.

Selama kurun waktu tertentu, China tetap dengan klaim yang tidak berdasar kesepakatan negara-negara di ASEAN. Menghadapi kemungkinan tingginya eskalasi di kawasan itu, pakar politik Dr. Dinna mengingatkan alasan Indonesia harus menyampaikan pesan yang tegas pada China agar negara China paham batas toleransi pemerintah Indonesia. Pesan Indonesia harus tegas khususnya pada kerjasama ekonomi tidak dapat diartikan berkompromi terkait kedaulatan wilayah (Marieva, 2021).

Dapat dipahami bahwa para ahli seperti sudah geram dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh China selama ini, maka dari itu menyarankan pemerintah Indonesia untuk mempertegas wilayah Indonesia dalam diskusi dengan China maupun dengan negara lain agar tidak terjadi lagi klaim tidak berdasar dari negara berdekatan.

Tindakan Strategis Pemerintah

Penting bagi seorang pemimpin strategis untuk memiliki *Problem Solving Skill* yang luar biasa. Dalam kasus yang sudah di jelaskan di atas, pemerintah menjadi pemimpin strategis untuk mengambil tindakan yang harus dilakukan agar tidak merugikan Indonesia. Setiap pengambilan keputusanpun perlu dibuat berdasarkan pemahaman tentang berbagai peristiwa di masa lalu dan memikirkan kemungkinan yang terjadi pada saat ini dan di masa depan.

Maka dari itu keputusan harus dipikirkan dengan seksama dan mempertimbangkan segala

kemungkinan hasil. Berikut merupakan karakteristik penting yang harus dimiliki seorang pemimpin strategis dalam pengambilan tindakan.

a. Berani mengambil tindakan tegas terutama disaat menghadapi krisis

Nota protes China terkait pengeboran minyak di kawasan Natuna merupakan krisis bagi Indonesia, karena jika salah mengambil langkah akan membuat hubungan kedua negara menjadi renggang atau menjauh. Padahal saat ini Indonesia memiliki beberapa kerjasama dengan negara China. Untuk itu Indonesia harus tegas dalam segala keputusannya agar tidak dinilai main-main dan tidak mudah diremehkan oleh negara lain. Untuk saat ini penulis setuju dengan pendapat para ahli di pembahasan di atas. Dr. Dinna Prapto Raharja, pakar politik dan pendiri *Synergy Policies*, menyatakan jika Indonesia merepson nota protes China itu. Hal ini dengan menunjukkan dengan alasan yang tidak mendasar dan bahwa memang tidak ada penghormatan atas kedaulatan wilayah beberapa negara di Asia Tenggara.

Nota ini perlu direspon dengan pernyataan yang terang dan gampal tentang kekecewaan Indonesia atas komitmen China menghormati kedaulatan negara-negara Asia Tenggara.

b. Kompetensi melakukan perubahan yang tahan lama

Dalam pengambilan keputusan pastinya sudah melalui proses yang panjang, untuk itu sebuah keputusan strategis harus tahan lama dan tidak mudah berubah. Karena akan dianggap kebijakan buruk jika mengalami perubahan dengan cepat karena tidak bisa membaur dengan lingkungan yang berjalan cepat. Memang saat ini dunia sangat sulit diprediksi karena adanya VUCA. Namun pemimpin strategis

diharapkan sudah bisa memprediksi jenis VUCA apa saja yang bisa terjadi sewaktu-waktu saat proses berjalannya kebijakan, sehingga setiap masalah yang diprediksi sudah ditemukan solusinya atau biasa kita sebut dengan skenario.

Cara-cara yang bisa dilakukan untuk menghadapi VUCA ialah hadapi *volatility* dengan *Vision*, terima dan rangkul perubahan sebagai bagian dari area kerja yang konstan dan tidak mudah dipredeksi. Kedua yaitu pecahkan *uncertainty* dengan *understanding* yaitu memahami dan mengembangkan cara berpikir dan bertindak yang baru sebagai respon dari ketidakpastian. Ketiga, manfaatkan *complexity* sebagai *clarity*. Yaitu selalu memperhatikan tim, mengembangkan kemauan tim, dan mendorong kemajuannya dengan mengadakan kolaborasi dan komunikasi yang terarah dan saling mengerti satu sama lain. Terakhir yaitu lawan *ambiguity* dengan *agility* yaitu mendorong fleksibilitas, kemampuan beradaptasi, dan ketangkasan untuk membuat rencana ke depan dan bersiap jika ada gangguan dan mengharuskan merubah rencana.

c. Hal yang perlu dilakukan dan mampu mengendalikan peristiwa/situasi

Akan banyak kerugian memang jika Indonesia bersitegang dengan China, karena beberapa kerjasama yang dilakukan. Salah satunya adalah kerjasama

di bidang ekonomi, jika terjadi masalah antara China dan Indonesia maka akan sulit untuk mengembalikan ekonomi Indonesia seperti semula karena pengaruh China yang sangat besar di Asia Tenggara bahkan sekarang diseluruh dunia. Untuk itu Indonesia perlu memikirkan strategi lainnya jika memang ingin mengambil tindakan tegas untuk China yang mengklaim wilayah Natuna.

Salah satunya adalah dengan cara *balance of power*, yaitu berusaha mengimbangi kekuatan China dengan bantuan negara lain yang bekerja sama dengan Indonesia. Teori terkait Keseimbangan Kekuatan merupakan teori yang dicetuskan oleh Stephen M. Walt menggambarkan jika aliansi secara umum dilihat sebagai respon negara terhadap suatu ancaman. Respon yang diakibatkan negara mempresentasikan dua kemungkinan bentuk aliansi yang akan dipilih oleh negara, yakni mewujudkan penyeimbangan (*balancing*) atau *bandwagoning*. (Warembai, 2014).

Konsep *balance of power* memang layak dipakai dalam tatanan internasional untuk berhubungan dengan negara lainya, yang mana kala negara masih memandang bahwa kepentingan nasional sebuah negara guna mencapai kekuatan atau kekuasaan. Seringkali *balance of power* akan terjadi jika muncul bipolarisme contoh seperti perang dingin terjadi. Dengan berjalan nya era, negara-negara melihat bahwa kepentingan didalam suatu negara tidak saja mencari kekuatan atau kekuasaan saja tapi ada bidang lain yang dapat dicapai guna memperoleh kepentingan negara. Dengan demikian, setelah perang dingin berakhir beberapa Institusi Regional Internasional yang bermunculan, khususnya dikawasan Asia-Pasifik.

Keberadaan beberapa institusi ini menjadikan *balance of power* bertransisi menjadi *institutional balancing* dalam berinteraksi dengan negara lain. *Institutional balancing* sebagai strategi

yang mengandalkan lembaga atau institusi multilateral untuk membatasi dan melemahkan kekuatan dan pengaruh saingannya (Juliandini, 2020).

SIMPULAN

Kawasan Laut Natuna Utara terkenal sebagai jalur laut perairan terpadat kedua di dunia setelah Terusan Suez di Mesir, kawasan ini juga memiliki keanekaragaman biota laut yang berlimpah serta mempunyai cadangan gas alam dan minyak yang besar. Oleh karena itu, wilayah ini masih menjadi perebutan *claim* antar beberapa negara.

Indonesia tidak menjadi negara *claimant* di wilayah Laut China Selatan, namun memiliki kepentingan di kawasan tersebut khususnya di wilayah Laut Natuna dan sekitarnya. Belum lama ini, China memberikan nota kepada Indonesia yang berisikan protes terkait pengeboran minyak di wilayah Natuna, padahal Natuna termasuk wilayah Indonesia. Hal ini terjadi karena ada perbedaan konsep kedaulatan laut yang berbeda antara Indonesia dan China. Indonesia mengandalkan UNCLOS, sedangkan China tidak ingin mengakui UNCLOS dan menggunakan konsep sembilan garis putus-putus menjelaskan *traditional fishing grounds*-nya. Untuk saat ini para ahli dari Indonesia berpendapat bahwa Indonesia tidak perlu meminta maaf atau menghentikan kegiatan pengeboran karena wilayah natuna merupakan bagian dari Indonesia dan selama ini China juga sudah sewenang-wenangnya mengklaim wilayah laut china selatan tanpa persetujuan negara-negara lain dengan kebijakan nine-dash linanya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan RI serta berbagai pihak lainnya yang terlibat dalam rangka penyusunan artikel ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Juliandini, Natasya. 2020. "Strategi Institutional Balancing di Kawasan Asia Pasifik". Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Lumbanrau, Raja Eben. 2016. CNN Indonesia. Indonesia dan China di Pusaran Laut China Selatan.

Mahmud. 2011. "Metode Penelitian Pendidikan". Bandung: CV Pustaka Setia.

Marrieva, Eva. 2021. Soal Nota Protes China, Indonesia Diminta Bersikap Tegas, <https://www.voaindonesia.com/a/soal-nota-protes-china-indonesia-diminta-bersikap-tegas/6336980.html> diakses tanggal 1 November 2023.'

Shabrina, Nadiah Oryza. Perubahan Respon Indonesia Terhadap Klaim Nine-Dash Line Tiongkok yang Melewati Perairan Natuna. Surabaya: Universitas Airlangga.

SIPRI. "Recent Trends in Military Expenditure," 2015, http://www.sipri.org/research/armaments/milex/research/armaments/milex/research/armaments/milex/milex_database diakses pada 21 November 2023.

Warembai, Claritha Cendrawati. 2020. "Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Masalah Nuklir Korea Utara". Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.